



**RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Arungbinang No.15 Kebumen Telepon / Fax (0287) 384088  
Email : kesbangpolkebumen@gmail.com Website : www.kesbangpol.kebumenkab.go.id  
Facebook : kesbangpol Twitter : @kesbangpol\_kbm

Kebumen, 04 November 2021.

Kepada

Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Kebumen.

di -

KEBUMEN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 649...

NOMOR	JENIS YANG KIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.	2 (dua) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN

Kepala Bidang Ideologi, Wasbang Kebangsaan dan Ketahanan  
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

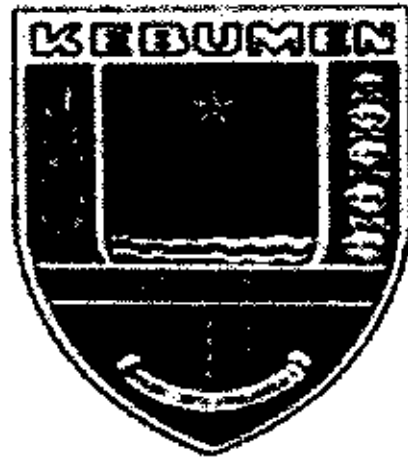


PRATIKN0, S.Sos

Pemnta Tk. I

NIP. 19691102 199510 1 001

*Handwritten:*  
4/11/2021  
Handwritten signature



**RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan rencana pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang penyusunannya berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Akhirnya kami berharap agar rencana program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kebumen.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Kebumen, 10 September 2021

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KEBUMEN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG.**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional

dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah.
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2022 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya dan merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun.
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh bidang yang ada. Masing-masing bidang wajib menyusun

rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan bersama.

Proses penyusunan Rencana Kerja juga tidak terlepas dari penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah.

#### B. LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187).

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kebumen.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2022 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :

1. Menjabarkan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan.

2. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program kegiatan Tahun 2022.
3. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

#### D. SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

##### B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

##### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan .

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

#### D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang hasil kajian program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

#### B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Kebumen.

### C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya pencapaian visi dan misi garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

## BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Berita Acara dan Foto Dokumentasi Forum OPD Tahun 2021.
2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023.
3. Undangan Forum OPD
4. Daftar Hadir
5. Notulen.

## BAB II

## HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU 2020

## A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun 2020 pagu anggaran untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 2.491.980.000 namun karena adanya pandemi covid 19 anggaran difocusing sehingga menjadi Rp. 1.056.177.000,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 8 program dan 23 kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan saran dan prasarana aparatur.
3. Program pengembangan data/ informasi.
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
6. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kertertiban dan keamanan.
7. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
8. Program pendidikan politik masyarakat.

Capaian hasil evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dan realisasi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Kesbang pol Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/ 4)
01	Program pengkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/ 4)
15	Pengendalian keamanan lingkungan	Fasilitasi Kominda dan fungsi FKDM dalam pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	72	48	12	6	50	12	66	91,67
	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>									
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan	Tercapainya solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat di wilayah Kabupaten	<b>1000</b>	460	200	0	0	50	510	51

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Kesbang pol Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	masyarakat	Kebumen								
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa dan terfasilitasinya kegiatan	<b>750</b>	450	150	150	100	150	750	100
	Penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat	Terinternalisasi nilai-nilai luhur ideologi pancasila dalam masyarakat	600	140	200	140	70	150	400	71,67
	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>									
	Facilitasi Pencapaian Halqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan	Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan umat beragama melalui FKUB dan jalin persaudaraan FPBI	750	375	150	0	0	50	425	57,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Kesbang pol Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	wawasan kebangsaan									
	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat	1.200	600	200	0	0	50	1.000	83,33
	Pendayagunaan Potensi Organisasi Masyarakat	Terlaksananya pembinaan agar Ormas dan LSM semakin mandiri, Ormas lebih memahami tentang kebijakan dan peraturan mengenai keormasan	900	480	200	0	0	125	605	67,22
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan									
	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan	Tercukupinya Bantuan keuangan partai yang	180	100	30	10	33,33	27	137	76,11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Kesbang pol Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Sosial	memiliki kursi di DPRD dan LPJ Bantuan keuangan	4	5						
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial	Terciptanya kondusivitas dan stabilitas keamanan melalui peran serta masyarakat	1.704	344	400	0	0	400	744	34,66
	<b>Program pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>									
	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlasamanya sosialisasi, sidak dan test urine narkoba serta peringatan HANI	4.900	2400	900	225	75	400	3.025	61,73
	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>									
	Penyuluhan kepada masyarakat	Terselenggaranya pendidikan politik, budaya dan etika	800	600	200	0	0	100	700	87,5



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Kesbang pol Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan organisasi kepemudaan Program Pendukung Operasional SKPD	Terlaksananya pembinaan organisasi masyarakat	405	200	75	0	0	75	275	67.90
	Program Pendukung Operasional SKPD									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhi kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	72	48	12	12	100	12	72	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan untuk keperluan komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	48	12	12	100	12	72	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan	72	48	12	12	100	12	72	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Kesbang pol Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	dinas/operasional	dinas operasional								
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi perkantoran	72	48	12	12	100	12	72	100
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		0	0	0	0	0	12		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan kebersihan gedung/kantor	0	0	0	0	0	12	12	12
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	72	48	12	12	100	12	72	100
	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	72	48	12	12	100	12	72	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan pengadaan	72	48	12	12	100	12	72	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	72	48	12	12	100	12	72	100







Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kantor Kesbang pol Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	/ informasi	cvaluasi pembangunan								
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen renja, renstra, LAKIP, RKA, DPA dll	27	20	5	5	100	5	5	111
	Program pengembangan data/ informasi / statistik daerah	Penyusunan database sosial politik dan keamanan	5	1	1	1	100	2	0	40

## B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tidak mempunyai Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional, hanya menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah sebagai indikator kinerja dalam pencapaian kinerja pelayanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Cakupan rehabilitasi kasus narkoba.
2. Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.
3. Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum.

Program yang mendukung tercapainya cakupan rehabilitasi kasus narkoba yaitu program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Untuk mencapai program tersebut tertuang dalam kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba berupa :

1. Sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba.
2. Pemilihan duta pelajar anti narkoba.
3. Leaflet kampanye anti narkoba.
4. Test Urine.

Untuk rehabilitasi kasus narkoba dilaksanakan oleh RSUD dan Puskesmas Karanganyar sedangkan untuk penindakan dilakukan oleh Polres Kebumen.

Program yang mendukung tercapainya peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat yaitu :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan, didukung kegiatan berupa :
  - a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat.

- b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
  - c. Penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat.
2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, didukung kegiatan berupa :
- a. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
  - b. Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
  - c. Pendayagunaan potensi organisasi masyarakat.

Program yang mendukung tercapainya partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum yaitu program Pendidikan politik masyarakat. Untuk mencapai program tersebut tertuang dalam kegiatan berupa :

1. Penyuluhan kepada masyarakat.
2. Koordinasi forum-forum diskusi politik.

Realisasi terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel T.C 30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Cakupan rehabilitasi kasus narkoba		Prosentase cakupan rehabilitasi kasus narkoba	15,38	17,95	0	0	10,71	0	0	0	Capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan karena anggaran terfokus pada sehingga pelaksanaan sosialisasi P4GN tidak maksimal	
2.	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat		Prosentase capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	85	90	0	0	15,3	90	0	0	1. Anggaran untuk kegiatan mengalami refocusing. 2. Setiap desa belum bisa trsrentuh untuk mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.	
3.	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum		Prosentase capaian partisipasi masyarakat/ penduduk dalam proses pemilihan umum	70	70	0	0	64	64	0	0	Indikasinya penyebab terjadi penurunan tingkat partisipasi karena adanya wabah covid 19 sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.	

### C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bab III Pasal 4 berbunyi Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah. Pasal 5 berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan hidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganann konflik sosial

di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah.
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menyelenggarakan tata kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di Kabupaten Kebumen harus tetap berjalan aman, lancar tanpa diikuti konflik yang menonjol.

Adapun isu strategis atau permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Masih kurang maksimalnya fungsi koordinasi dari para pengambil kebijakan, utamanya Bupati, wakil bupati dan anggota forkopimda karena belum adanya fasilitasi untuk forum koodinasi pimpinan daerah.
2. Belum maksimalnya fungsi intelijen dalam merealisasikan sistem deteksi dini, cegah dini dan laporan cepat kepada penentu kebijakan serta belum terbentuknya jejaring informasi melalui pembentukan FKDM di tingkat Kecamatan dan Desa dalam rangka menciptakan kondusifitas daerah.
3. Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai pancasila.
4. Melemahnya jiwa nasionalisme yang mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap bela negara.
5. Meningkatnya potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan daerah seiring dengan meninggkkkatnya dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi;
6. Kecenderungan munculnya konflik sosial, isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya.
7. Ancaman terorisme, radikalisme dan komunisme yang muncul disemua tingkatan sosial masyarakat.

8. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
9. Kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.
10. Rendahnya partisipasi politik perempuan yang tercermin belum terpenuhinya kuota perempuan dalam parlemen/ DPRD baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
11. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan oleh perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi.
12. Lemahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaan serta kecenderungan tidak pahamnya tentang fungsi dan kapasitas ormas.
13. Kurangnya fungsi tim pemantauan orang asing di Kab. Kebumen sehingga tidak terpantau keberadaan orang asing.
14. Belum maksimalnya kontribusi parpol dalam pendidikan politik.

D. Review Usulan program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dengan mempertimbangkan pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, maka diperlukan adanya penambahan anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Sub Kegiatan yang perlu dilakukan penambahan anggaran dalam Rancangan Awal RKPD antara lain :

1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan



Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini yaitu untuk kegiatan sosialisasi politik sampai ditingkat elemen paling bawah.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini yaitu untuk kegiatan sosialisasi P4GN sampai ditingkat elemen paling bawah.

Berdasarkan isu strategis tersebut, rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 diarahkan pada upaya :

1. Memaksimalkan fungsi koordinasi dari para pengambil kebijakan, utamanya Bupati, wakil bupati dan anggota forkopimda karena belum adanya fasilitasi untuk forum koodinasi pimpinan daerah.
2. Fasilitasi Tim Kewaspadaan dini dan tim informasi dan komunikasi serta pembentukan FKDM di tingkat Kecamatan dan Desa dalam rangka menciptakan kondusifitas daerah.
3. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan fasilitasi dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan.
4. Penguatan jiwa nasionalisme melalui kegiatan fasilitasi pendidikan bela negara.
5. Fasilitasi terhadap upaya pengendalian dan pencegahan ATHG dalam rangka menciptakan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan daerah.;
6. Fasilitasi penanganan konflik sosial dan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya.
7. Meningkatkan fasilitasi dalam rangka pencegahan bahaya terorisme, radikalisme dan komunisme yang muncul disemua tingkatan sosial masyarakat.
8. Fasilitasi P4GN dan Prekursor lainnya serta diikuti pembentukan perda.
9. Melaksanakan fasilitasi dan pendidikan demokrasi di semua tingkatan masyarakat.
10. Fasilitasi pendidikan politik bagi perempuan.

11. Fasilitasi penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka penguatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan serta mengurangi kesenjangan.
12. Fasilitasi tim pengawas ormas dan fasilitasi pembinaan kepada ormas dalam rangka peningkatan kapasitas ormas.
13. Fasilitasi terhadap tim pemantauan orang asing.
14. Fasilitasi dan peningkatan bantuan keuangan kepada parpol.

Review antara Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan Dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C3.31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Kebumen

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kesbang pol	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %	1.936.627.000	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kesbang pol	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100 %	2.728.302.000	
1.1	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbang pol		7 dok	<b>15.701.000</b>		Kesbang pol			15.701.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	13.771.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	13.771.000	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	2 dok	1.930.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	2 dok	1.930.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1,649,559,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	2,449,559,000	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan	Kesbang pol	Jumlah orang yang	22 orang	1.641,192,000	Penyediaan Gaji dan	Kesbang pol	Jumlah orang yang	22 orang	2,441,192,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	Tunjangan ASN		terbayar gaji dan tunjangan			dan Tunjangan ASN		yang terbayar gaji dan tunjangan				
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbang pol	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun pada tahun n	4 dok	8.367.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesbang pol	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun pada tahun n	4 dok	8.367.000		
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	22 orang	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	22 orang	30.000.000		
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kesbang pol	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	22 orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Kesbang pol	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	22 orang	30.000.000		
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	102.934.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	94.609.000		
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kesbang pol	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi	4 Jenis	3.328.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kesbang pol	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen	4 Jenis	3.328.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	Bangunan Kantor		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.657.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.657.000		
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbang pol	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	6.989.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbang pol	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	6.989.000		
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbang pol	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dok	5.325.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbang pol	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 dok	2.000.000		
1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	6.720.000	Penyediaan Bahan/Material	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12 bulan	6.720.000		
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbang pol	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	57.915.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbang pol	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	57.915.000		
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kesbang pol	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis	12 bulan	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kesbang pol	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis	12 bulan	5.000.000		
1.5	Penyediaan Jasa	Kesbang pol	Jumlah bulan	12 bulan	80.112.000	Penyediaan	Kesbang pol	Jumlah bulan	12 bulan	80.112.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbang pol	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1,664,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesbang pol	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1,664,000		
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12 bulan	36,628,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbang pol	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12 bulan	36,628,000		
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbang pol	Jumlah Bulan Penyedia Kebersihan Kantor	12 bulan	41,820,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbang pol	Jumlah Bulan Penyedia Kebersihan Kantor	12 bulan	41,820,000		
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbang pol	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 unit	58,321,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kesbang pol	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 unit	58,321,000		
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kesbang pol	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	43,931,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kesbang pol	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	43,931,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	Operasional atau Lapangan					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas/Operasional				
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbang pol	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	7 unit	5,990,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesbang pol	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	7 unit	5,990,000		
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbang pol	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	8,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbang pol	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	8,400,000		
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbang pol	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21,43 jumlah per 100.000 penduduk	483,247,000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbang pol	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	21,43 jumlah per 100.000 penduduk	333.247.000		
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 kegiatan	483,247,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 kegiatan	333.247.000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbang pol	Jumlah kegiatan rangkaian peringatan HUT RI dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen Tahun 2022	23 kegiatan	483,247,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binca Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesbang pol	Jumlah kegiatan rangkaian peringatan HUT RI dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen Tahun 2022	23 kegiatan	333.247.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesbang pol	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan	68%	3,420,289,000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	Kesbang pol	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan	68%	3,292,889,000	



No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
3.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 kegiatan	3,420,289,000	POLITIK Pelaksanaan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 kegiatan	3,292,889,000	
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Kesbang pol	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	4 kegiatan	3,420,289,000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Kesbang pol	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	4 kegiatan	3,292,889,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbang pol	Cakupan Program dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	76,764,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbang pol	Cakupan Program dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	37,764,000	
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	3 kegiatan	76,764,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	3 kegiatan	37,764,000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbang pol	Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan	150 orang	70,739,000	Organisasi Kemasyarakatan Ormas Asing di Daerah	Kesbang pol	Organisasi Kemasyarakatan	150 orang	35,739,000	
4.1.2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbang pol	Jumlah tersusunnya data base ormas, LSM dan Partai Politik	1 dokumen	6,025,000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbang pol	Jumlah tersusunnya data base ormas, LSM dan Partai Politik	1 dokumen	2,025,000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan Ormas Asing di Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kesbang pol	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	32,14 jumlah per 100.000 penduduk	1,513,341,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kesbang pol	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	32,14 jumlah per 100.000 penduduk	1,345,941,000	
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 kegiatan	1,513,341,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbang pol	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 kegiatan	1,345,941,000	
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Kesbang pol	Jumlah Lokasi sasaran Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	3 kegiatan	1,370,209,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kesbang pol	Jumlah Lokasi sasaran Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	3 kegiatan	1,242,809,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbang pol	Jumlah pelajar, ASN, masyarakat yang mengikuti sosialisasi narkoba dan pemilihan duta anti narkoba	400 orang	143,132,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbang pol	Jumlah pelajar, ASN, masyarakat yang mengikuti sosialisasi narkoba dan pemilihan duta anti narkoba	400 orang	103,132,000		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Kesbang pol	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi,	60 %	179,099,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Kesbang pol	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA,	60 %	150,099,000		

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi			AN NASIONAL, DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi			
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesbang pol	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	2 kegiatan	179.099.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kesbang pol	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	2 kegiatan	150.099.000	
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Kesbang pol	Jumlah Rakor FKDM Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Rakor Forkopimda dan Forkopimcam	4 kali	129.099.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Kesbang pol	Jumlah Rakor FKDM Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Rakor Forkopimda dan Forkopimcam	4 kali	124.099.000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Rakor Timdu penanganan konflik tingkat kecamatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik	2 kali	20,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kesbang pol	Jumlah Rakor Timdu penanganan konflik tingkat kecamatan dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik	2 kali	20,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan Konflik di Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
6.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbang pol	Jumlah Dokumen Monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik	1 dokumen	30,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik	1 dokumen	6,000,000



E. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan. Usulan dari peserta Forum Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen diantaranya :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai wadah intelijen untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang kondusif maka perlu adanya dukungan anggaran yang mendekati riil.
- b. Kegiatan tahun 2021 yang tidak dapat terlaksana karena refocusing maka untuk dapat direalisasi kembali guna pencapaian IKU Perangkat Daerah.
- c. Kegiatan Pendidikan ideologi Pancasila perlu ditingkatkan.
- d. Dengan berubahnya nomenklatur baru, dapatnya untuk ditambahkan anggaran dan dukungan sarana prasarana kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas dan diusulkan pada tahun anggaran 2023.
- e. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait kuota keterwakilan anggota legislative dan pengurus parpol perempuan masih sangat minim, untuk menjaring perempuan anggaran maupun target diperbanyak dengan harapan nantinya perempuan yang duduk dilegislatif sejajar dengan laki-laki.

Berkaitan dengan beberapa usulan dari masyarakat, telah diakomodir dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen 2022.

## BAB III.

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen merupakan Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, diperlukan koordinasi yang lebih baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan, baik dari unsur pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tentunya ada benang merah dalam mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita dimana menghadirkan kembali negara untuk :

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,
3. Melakukan revolusi karakter bangsa.
4. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif. Selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kerjasama dengan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai keagamaan.

Sasaran : Meningkatnya kesadaran aparat dan stakeholder terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.

Indikatornya :

- a. Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan.
  - b. Jumlah ormas aktif.
  - c. Jumlah kasus konflik antar umat beragama.
  - d. Jumlah keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai agama.
2. Meningkatkan koordinasi serta komitmen antara aparat, pam swakarsa dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah. Sasarannya : Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah serta terdeteksinya potensi kerawanan sosial.

Indikatornya : Jumlah penanganan konflik sosial yang terjadi.

3. Mewujudkan wilayah Kabupaten Kebumen yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba khususnya dikalangan pelajar dan generasi muda.

Sasarannya : Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kebumen.

Indikator : Persentase penurunan jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan generasi muda.

4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat. Sasarannya : Meningkatnya kehidupan berdemokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Indikatornya: Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

## B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 bertujuan memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## C. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tahun 2022 mencakup 6 (enam) program, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
    - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Sub Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara , karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Sub Kegiatan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

Program dan Kegiatan Tahun 2022  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Kejuruan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											7,608,367,000	8,824,166,775
8	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,938,827,000	4,826,224,775
8	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											15,701,000	19,500,000
8	04	01	2.01	01	01	01	100 %	5 dok	7 dokumen	13,771,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,000,000





		Administrasi Umum Perangkat Daerah										102,934,000		153,336,000				
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumeh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	12 bulan	3,325,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumeh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	12,857,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	13,936,060	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumeh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	6,969,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,500,000	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumeh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	12 bulan	12 bulan	5,325,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumeh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	6,720,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,000,000	

3	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Peringkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	147 orang kali	12 bulan	57,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	90,000,000	
3	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arah Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan atsip dinamis	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Peringkat Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	100 %	12 bulan	12 bulan	10,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,300,000	
3	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,343,545,600	
3	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	0 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,343,545,600
3	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80,112,000				84,300,000	
3	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sama Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	12 bulan	1,664,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,500,000	
3	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	100 %	12 bulan	12 bulan	36,628,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	48,000,000	

B	01	01	2.00	04	Cakupan pelayanan pemungutan pajak umum pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Penyedia Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	100 %	12 bulan	12 bulan	41,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan pemungutan pajak daerah pemerintahan daerah	100 %	43,600,000
B	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
B	01	01	2.09	02	Cakupan pelayanan pemungutan pajak, urusan pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	100 %	7 unit	13 unit	43,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan pemungutan pajak daerah pemerintahan daerah	100 %	60,000,000
B	01	01	2.09	06	Cakupan pelayanan pemungutan pajak, urusan pemeliharaan dan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	100 %	7 unit	13 unit	5,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan pemungutan pajak daerah pemerintahan daerah	100 %	20,000,000
B	01	01	2.09	09	Cakupan pelayanan pemungutan pajak, urusan pemeliharaan dan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	100 %	1 unit	13 unit	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan pemungutan pajak daerah pemerintahan daerah	100 %	45,000,000









8	01	06	2.01	05	<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi</p>	<p>Jumlah Dokumen Monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik</p>	<p>Jumlah kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik</p>	<p>Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen</p>	<p>50 %</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>2 kegiatan</p>	<p>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</p>	<p>30,000,000</p>	<p>Personase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi</p>	<p>60 %</p>	<p>37,538,000</p>
<b>TOTAL</b>													<p>7,809,367,000</p>	<p>8,824,158,776</p>			



## BAB V PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas dan Fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahunan Daerah yang berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas Kabupaten dengan tema dan prioritas Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

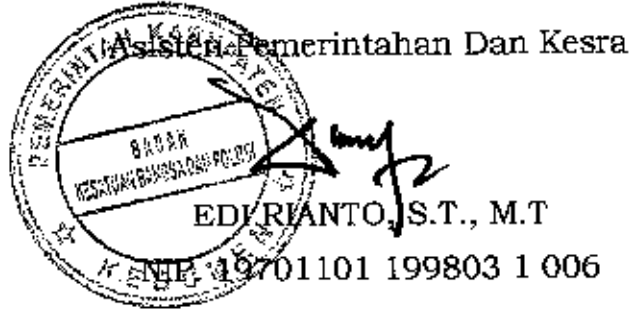
Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya menjabarkan secara ringkas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dan menterjemahkan visi dan misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dan merupakan hasil Forum Perangkat Daerah (Forum PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021, sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

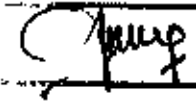

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen serta sebagai acuan dalam menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder.

Kebumen, 10 September 2021

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN



TEL	PEPEDA
	TA TANGAN
Tri Muggorawati	
Mugroho Wisnu Haryoko	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kebumen  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.0000.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.0000.01.0000.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Uraian Kegiatan	Capaian Program	Meliputi Kinerja		Indikator Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Catatan	Pegawai Madya Kemana Tahun 2023		
			Kegiatan	Sub Kegiatan			Program	Waktu Pelaksanaan	HABK			Kegiatan	Target	Target
UNSUB PERUNTUKAN UMUM											8.824.136.776	4.826.224.776	18.500.000	
KESETUAN BANGSA DAN POLITIK											7.092.387.000			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1.836.627.000			
Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											15.791.000			
6.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan-Pengikat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengikat daerah yang terwujud	100 %	5-titik	Semua Kabupaten, Kecamatan, Desa	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pengikat daerah yang terwujud	7 dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17.000.000
6.01.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pengikat daerah yang terwujud	100 %	2 dokumen	Kab. Kebumen, Kecamatan, Desa	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pengikat daerah yang terwujud	7 dokumen	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.500.000
Administrasi Keumatan - Perangkat Daerah											1.692.552.000		2.854.643.175	
6.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah orang yang terbayar gaji dan tunjangan	100 %	22 orang	Semua Kabupaten, Kecamatan, Desa	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.832.643.175
6.01.01.2.02	Pelaksanaan Posaustrehan dan Posaustrehan dan Keuangan SWD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja pengikat daerah yang terwujud	100 %	4 dokumen	Kab. Kebumen, Kecamatan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	32.000.000
Administrasi Kepegawaian - Perangkat Daerah											30.000.000		50.500.000	
6.01.01.2.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berprestasi Rujas dan Fungsional	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	22 orang	Kab. Kebumen, Kecamatan, Desa	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	22 orang	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30.000.000
Administrasi Umum - Perangkat Daerah											102.924.000		159.334.000	
6.01.01.2.04	Pengelolaan Kelembagaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jars Penyelenggaraan Instalasi Listrik/Pengembangan Bangunan Kantor	100 %	4 jenis	Kab. Kebumen, Kecamatan, Desa	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.000.000
6.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	12 bulan	Kab. Kebumen, Kecamatan, Desa	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	13.000.000
6.01.01.2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	100 %	12 bulan	Kab. Kebumen, Kecamatan, Desa	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	100 %	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10.000.000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kebumen  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 8.01.000.000.01.0000 BADAN KESANTUNAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 8.01.000.000.01.0000 BADAN KESANTUNAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tercapai Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cakupan Pendang	Pembelian Baju Bencana Tahun 2022		
						Program	Keterian Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Ukr	Target	Kebijakan Dana/ Pagu Indikator (Rp.)
B 01 01 2.06 06	Penyediaan Saran Daerah dan Narahan Prondang- Urdangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Pelaturn Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Sejangkit Daerah	Kecamatan, Sembuh Kebumen, Sembuh Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	2 dokumen	12 bulan	5,325,000	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000	
B 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Bahan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	12 bulan	12 bulan	6,720,000	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,000,000	
B 01 01 2.06 09	Pengembangan Rapel koordinasi dan komunikasi SIPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Komunikasi SIPD yang di selenggarakan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	147 orang Rall	12 bulan	57,915,000	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	90,000,000	
B 01 01 2.06 10	Penatausahaan Asep Dhain s pada SIPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan asip dhain s	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	12 bulan	12 bulan	10,000,000	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000	
B 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan Borang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	0 unit	0 unit	0	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,343,545,600	
B 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Suat Merawat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	12 bulan	12 bulan	1,664,000	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,500,000	
B 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Manusial	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	12 bulan	12 bulan	36,620,000	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	46,000,000	
B 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Relayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kobersihan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	100 %	12 bulan	12 bulan	41,820,000	Dana Transfer Umum- Umum- Dana Alokasi Utama	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	49,800,000	
<b>Urusan Jasa Penunjang</b>										94,300,000				





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kabupaten  
Tahun 2022**

Unit Organisasi: 8.01.000.000.01.0000 BADAN KESETIAHAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub-Unit Organisasi: 8.01.000.000.01.0000 BADAN KESETIAHAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022			Arah dan Sasaran Kinerja		Sasaran/ Dampak/ Peta Indikator (R/a)
		Capaian Program	Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Jumlah Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Mega Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Output Berhingga	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				
80106 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kecepatan Diri/ Kegiatan keadilan, Peningkatan Orang Asing Terganggu Akibat Asing dan Lainnya Asing, Cegah dan Atasi ANSA (Meningkatkan Pasifitas dan Mengurangi Bidang Kecepatan Diri/ Penanganan konflik di Daerah	Peningkatan Peningkatan Konflik Berbasis Budaya SARA, Ideologi, Politik, Agama dan SARA/ Etnis	Jumlah Dokumen Monitoring dan pelaporan kecapaian diri dan peta kawasan konflik	Jumlah kegiatan pemantauan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan kecapaian diri nasional dan pengendalian konflik	60 %	1 dokumen	2 kegiatan	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penertiban Perencanaan Konflik Berbasis Budaya SARA, Ideologi, Politik, Agama dan SARA/ Etnis	37.556.000
<b>TOTAL</b>								7.698.387.000			8.654.156.778

09 September 2021  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 EDY BIANTO  
 NIP. 19704101198031006